

SKRIPSI

**ANALISIS PEMBAGIAN KERJA PETANI HUTAN DI AREAL
HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm) MACINNONG DESA
CINNONG, KECAMATAN SIBULUE, KABUPATEN BONE**

Disusun dan Diajukan Oleh:

NUR ZAINAH BUHARI

M011 20 1154



**DEPARTEMEN KEHUTANAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024



HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PEMBAGIAN KERJA PETANI HUTAN DI AREAL HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm) MACINNONG DESA CINNONG, KECAMATAN SIBULUE, KABUPATEN BONE

Disusun dan Diajukan Oleh:

Nur Zainah Buhari

M011 20 1154

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Kehutanan

Fakultas Kehutanan

Universitas Hasanuddin

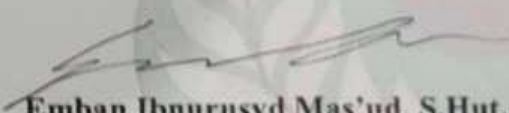
Pada tanggal 15 Agustus 2024


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui:

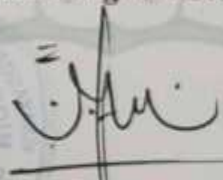
Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Emban Ibnurusyd Mas'ud, S.Hut., MP
NIP. 19860403201404 1 002


Dr. Ir. Ridwan, MSE
NIP. 19680112199403 1 001

Mengetahui,
Ketua Program Studi


Dr. Ir. Sitti Nuraeni, M.P
NIP. 19680410199512 2 001



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Zainah Buhari
NIM : M011201154
Program Studi : Kehutanan
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya ilmiah saya berjudul:

“Analisis Pembagian Kerja Petani Hutan di Areal Hutan Kemasyarakatan (HKm) Macinnong Desa Cinnong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone”

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar – benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 15 Agustus 2024

Yang menyatakan,



Nur Zainah Buhari



Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRAK

Nur Zainah Buhari (M011 20 1154). Analisis Pembagian Kerja Petani Hutan di Areal Hutan Kemasyarakatan (HKm) Macinnong Desa Cinnong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone di bawah bimbingan Emban Ibnursyd Mas'ud dan Ridwan

Pembagian kerja dalam rumah tangga seringkali dijadikan masalah oleh sebagian masyarakat, yang menempatkan perempuan hanya diberikan kesempatan untuk mengurus urusan domestik sementara laki-laki memperoleh tempat yang utama untuk mengurus urusan publik atau mencari nafkah untuk keluarganya, hal tersebut seringkali disebut sebagai budaya patriarki. Hal ini berdampak pada rumah tangga petani dalam hal pembagian peran dan tanggung jawab yang masih dipengaruhi oleh cara pandang masyarakat terkait ranah gender yang membuat peran perempuan hanya pada lingkup domestik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan aktivitas rumah tangga petani dan menganalisis pembagian kerja rumah tangga petani di areal HKm Macinnong Desa Cinnong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone. Penelitian dilakukan pada bulan Januari-Februari 2024. Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode yang terdiri atas teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan etnografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas petani di areal HKm meliputi kegiatan pertanian dan beternak, aktivitas ini dilakukan oleh suami. Sedangkan aktivitas keluarga petani di luar areal HKm meliputi aktivitas domestik seperti mencuci, memasak dan membersihkan rumah dilakukan oleh istri. Pembagian kerja yang diterapkan oleh keluarga petani di HKm Macinnong menunjukkan adanya indikasi budaya patriarki, peran laki-laki lebih dominan dalam aktivitas di luar rumah terutama di areal HKm dan laki-laki memiliki hak dalam pengambilan keputusan sedangkan perempuan hanya ditugaskan bekerja di dalam rumah saja. Terjadinya ketimpangan gender dikarenakan perempuan dianggap sebagai kaum yang lemah yang memiliki keterbatasan dan kurang mampu bekerja di sektor produktif.

Kata Kunci: pembagian kerja, HKm, budaya patriarki, aktivitas.



KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir dengan judul “**Analisis Pembagian Kerja Petani Hutan di Areal Hutan Kemasyarakatan (HKm) Macinnong Desa Cinnong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone**”. Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini, yaitu untuk menyelesaikan studi yang saat ini sedang ditempuh di Universitas Hasanuddin Makassar dan untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan.

Tugas akhir ini penulis dedikasikan kepada kedua orang tua yang sangat disayangi Ibunda **Harifa** dan Ayahanda **Busra** yang telah berjuang dengan sepenuh hati untuk membiayai keperluan penulis selama perkuliahan serta dorongan yang telah diberikan, bimbingan dan kasih sayang yang tulus serta doa yang tiada hentinya dipanjatkan kepada Allah SWT demi kesuksesan penulis selama perkuliahan dan penyusunan tugas akhir ini. Selain itu, terima kasih kepada kakanda **Chandra Mattaliyu Buhari, Adhe Rosalina Buhari** dan **Mukhtar Ghalib Buhari** yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan materil maupun moril kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih dengan rasa haru kepada:

1. Bapak **Emban Ibnurusyd Mas’ud, S.Hut., M.P.** Dan bapak **Dr. Ir. Ridwan, MSE.** selaku dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 yang telah memberikan segala bantuannya seperti memberikan saran, semangat dan motivasi yang luar biasa serta membantu perihal mengarahkan penulis mulai dari penentuan judul skripsi, tujuan, metode hingga selesainya skripsi ini.
2. Ibu **Ir. Adrayanti Sabar, S.Hut., M.P., IPM** dan bapak **Dr. Ir. Budiaman, M.P** selaku dosen penguji yang telah menyempatkan waktu, memberikan saran dan masukan dalam perbaikan skripsi ini.
3. Ketua Departemen Kehutanan ibu **Dr. Ir. Nuraeni, M.P** dan **Seluruh Dosen** **lgajar dan Staf Administrasi** Fakultas Kehutanan.



Macinnong, serta bapak **Ngenre beserta keluarga** selaku informan yang telah bersedia menerima penulis dan membantu penulis dalam mengumpulkan data penelitian.

5. Kepada keluarga besar **Lababoratorium Kebijakan dan Kewirausahaan Kehutanan** khususnya **Amriani** yang selalu memberi semangat dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta teman-teman **Imperium 20** yang telah menemani penulis dari awal perkuliahan sampai saat ini.
6. Kepada teman magang seperjuangan **Keluarga Ronggong** dan **Tim Bissoloro (Nilam Cahyani P., Rinni, Oktavia Dwiana L., Andini Abdullah, Yolanda Eka P., Khairil Mukhtar, Sastra Jessen R., Muh. Rafli, Asri, Muhammad Yaqin, Abdi Ihsan, Muhammd Fattah Al-Ghaniy T., Muhammad Tegar R. dan Muh. Idris)** yang telah menemani selama magang dan KKN serta memberikan pengalaman baru dan semangat yang luar biasa.
7. Kepada Organisasi **Ikatan Keluarga Mahasiswa Bone Unhas** yang telah memberikan dukungan dan semangat serta sudah menjadi tempat untuk bertukar cerita.

Sebagai penutup, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang tidak sempat disebutkan. Walaupun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini, tetapi penulis menyadari bahwa masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis berharap dapat menerima masukan dan kritik yang dapat membangun untuk kedepannya.

Makassar, 15 Agustus 2024

Nur Zainah Buhari



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| ABSTRAK | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR GAMBAR | ix |
| DAFTAR TABEL | x |
| DAFTAR LAMPIRAN | xi |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Tujuan dan Kegunaan | 3 |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | 4 |
| 2.1 Hutan Kemasyarakatan (HKm)..... | 4 |
| 2.2 Analisis Pembagian Kerja..... | 5 |
| 2.3 Budaya Patriarki..... | 7 |
| 2.4 Etnografi | 10 |
| III. METODELOGI PENELITIAN | 13 |
| 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian..... | 13 |
| 3.2 Prosedur Penelitian | 13 |
| 3.2.1 Metode Pengumpulan Data..... | 13 |
| 3.2.2 Jenis Data | 14 |
| 3.3 Populasi dan Informan | 14 |
| 3.4 Analisis Data | 14 |
| IV. HASIL DAN PEMBAHASAN | 16 |
| 4.1 Gambaran Umum Lokasi | 16 |
| Profil Informan..... | 16 |
| Pola Aktivitas Petani | 17 |
| 4.3.1 Aktivitas Petani di Areal HKm | 17 |



| | | |
|-----------|--|-----------|
| 4.3.1.1 | Aktivitas Produktif | 19 |
| 4.3.2 | Aktivitas Rumah Tangga Keluarga Petani | 20 |
| 4.3.2.1 | Aktivitas Domestik..... | 20 |
| 4.4 | Pola Pembagian Kerja Keluarga Petani | 21 |
| V. | KESIMPULAN DAN SARAN | 25 |
| 5.1 | Kesimpulan | 25 |
| 5.2 | Saran | 25 |
| | DAFTAR PUSTAKA..... | 26 |
| | LAMPIRAN..... | 29 |



DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Judul | Halaman |
|---------------|--|----------------|
| Gambar 1. | Peta Lokasi Penelitian | 13 |
| Gambar 2. | Lahan yang dikelola Bapak Ngenre | 18 |
| Gambar 3. | Pola Pembagian Kerja Rumah Tangga Petani | 22 |



DAFTAR TABEL

| Tabel | Judul | Halaman |
|--------------|---|----------------|
| Tabel 1. | Profil anggota keluarga | 17 |
| Tabel 2. | Pembagian kerja dalam aktivitas publik..... | 19 |
| Tabel 3. | Pembagian kerja dalam aktivitas publik..... | 21 |
| Tabel 4. | Catatan aktivitas keluarga petani..... | 45 |



DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran | Judul | Halaman |
|-------------|---|---------|
| Lampiran 1. | Panduan Wawancara..... | 29 |
| Lampiran 2. | Dokumentasi saat meminta izin penelitian kepada ketua KTH Macinnong..... | 31 |
| Lampiran 3. | Dokumentasi wawancara bersama Bapak Ngenre..... | 31 |
| Lampiran 4. | SK Penetapan HKm Macinnong..... | 32 |
| Lampiran 5. | Catatan Lapangan Aktivitas Petani..... | 39 |
| Lampiran 6. | Catatan Aktivitas Rumah Tangga Petani | 45 |



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembagian kerja dalam rumah tangga sering menjadi masalah di masyarakat, di mana perempuan hanya diberi kesempatan untuk mengurus pekerjaan domestik sementara laki-laki diberikan peran utama dalam urusan publik atau mencari nafkah untuk keluarga (Firdaus, 2015). Fenomena ini dikenal sebagai budaya patriarki. Namun, dalam beberapa kasus saat ini, perempuan telah diberikan kebebasan untuk berpartisipasi dalam kegiatan di luar rumah guna mendukung perekonomian keluarga mereka (Kholifah dan Masruroh, 2022).

Karena budaya patriarki yang masih kuat, posisi perempuan dalam struktur sosial seringkali dianggap lebih lemah (Sakina dan Siti, 2017). Budaya ini menempatkan laki-laki sebagai pihak yang berkuasa dan cenderung memiliki lebih banyak kebebasan dibandingkan perempuan. Salah satu alasan mengapa budaya patriarki masih ada di Indonesia dikarenakan budaya ini sudah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia sejak lama, bahkan sebelum mengenal tulisan. Hal tersebut berdampak pada rumah tangga petani dalam hal pembagian peran dan tanggung jawab yang masih dipengaruhi oleh cara pandang masyarakat terkait ranah gender yang membuat peran perempuan hanya pada lingkup domestik (Widyasari dan Suyanto, 2023). Hasil observasi awal di lokasi penelitian ini juga memperlihatkan indikasi adanya budaya patriarki.

Indikasi di atas menjadi *frame* yang menarik untuk dikaji lebih mendalam, penelitian-penelitian dan literasi pembagian kerja di Sulawesi Selatan juga masih sangat kurang. Selain itu di wilayah ini masih dikenal dengan budaya patriarki yang masih kental (Karim dan Hartati, 2022). Pernyataan menarik bahkan dijelaskan oleh Kesuma dan Irwan (2019) bahwa kedudukan perempuan Bugis masih memegang teguh *lontara* dan *pappaseng* yang mengatakan bahwa kedudukan perempuan Bugis hanya berada pada tatanan domestik, sehingga hal menjadikan perempuan Bugis sebagai makhluk nomor dua dalam n sosial.



Penelitian ini mencoba mendalami konteks pembagian kerja dengan fokus melihat adanya indikasi budaya tersebut dan mengintegrasikannya dengan konteks pengelolaan hutan. Desa Cinnong dipilih menjadi lokasi penelitian karena masyarakatnya telah mendapatkan hak akses berupa HKm Maccinong, dan hasil observasi awal memperlihatkan adanya aktivitas masyarakat dalam mengelola kawasan hutan.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan pola aktivitas rumah tangga petani di HKm Macinnong Desa Cinnong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone.
2. Menganalisis pola pembagian kerja rumah tangga petani di HKm Macinnog Desa Cinnong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memberikan data dan informasi terkait aktivitas rumah tangga dan pembagian kerja dalam rumah tangga petani di HKm Macinnong Desa Cinnong, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Menurut PERMENLHK No. 9 Tahun 2021 tentang Hutan Kemasyarakatan (HKm), dijelaskan bahwa Hutan Kemasyarakatan adalah hutan milik negara yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat sekitar. Hutan negara ini terletak di atas tanah yang tidak memiliki hak milik. Pengelolaan HKm dilakukan oleh masyarakat setempat yang bekerja sama dengan pemerintah melalui skema hak guna pakai, bukan hak milik. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari potensi konflik di masyarakat serta menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Penerapan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dapat dilakukan di kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang tidak memiliki hak atau izin yang melekat. Skema ini dirancang untuk mendukung masyarakat kurang mampu yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan, serta bergantung pada pemanfaatan sumber daya hutan untuk kelangsungan hidup mereka (Moeliono et al., 2015). Izin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) diberikan kepada masyarakat setempat, kelompok tani hutan, atau koperasi, yang memungkinkan mereka mengelola hutan baik untuk keperluan produksi maupun perlindungan. Izin ini berlaku selama 35 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 5 tahun (PERMENLHK No. 9 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial).

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil, dan berkelanjutan, sekaligus menjaga dan melestarikan fungsi hutan dan lingkungan hidup, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. 83/Menlhk/Kum.1/10/2016. Masyarakat yang dimaksud adalah kelompok sosial yang terdiri dari warga negara Indonesia yang tinggal di dalam atau di sekitar hutan dan bergantung pada hutan sebagai mata pencaharian, dengan yang bisa memengaruhi ekosistem hutan. Hutan Kemasyarakatan (HKm) hutan milik negara yang pemanfaatannya ditujukan untuk memberdayakan



masyarakat setempat. HKm ini merupakan salah satu dari lima skema perhutanan sosial yang dikembangkan oleh Kementerian Kehutanan bersama masyarakat (Fahri, 2022).

Pengelolaan hutan di Indonesia dilakukan oleh pemerintah melalui Perum Perhutani, sektor swasta, dan komunitas lokal yang tinggal di sekitar hutan. Pada tahun 1995, Perum Perhutani memperkenalkan pendekatan baru dalam pengelolaan hutan dengan melibatkan masyarakat melalui program hutan rakyat. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan aspek ekonomi, seperti peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan mendukung pembangunan daerah. Selain itu, program ini juga diharapkan memberikan manfaat ekologis, seperti pengendalian erosi, menjaga kesuburan tanah, dan menjaga keseimbangan tata air (Romansah, 2007). Hingga tahun 2004, luas hutan rakyat telah mencapai 1.568.415,6 hektar (sekitar 1,1 persen dari total luas kawasan hutan di Indonesia) dengan potensi kayu sebesar 39.416.557,5 meter kubik (Sihombing, 2011).

2.2 Analisis Pembagian Kerja

Pembagian kerja merupakan proses memecah pekerjaan menjadi unit-unit tugas yang terspesialisasi, sehingga setiap individu bertanggung jawab atas tugas-tugas spesifik, bukan seluruh rentetan pekerjaan. Dalam konteks persaingan yang sengit, penerapan pembagian kerja yang efektif sangat penting untuk kelangsungan organisasi. Tujuan utama dari pembagian kerja ini adalah mencapai tujuan organisasi, di mana struktur organisasi menetapkan tugas-tugas dasar yang akan dilaksanakan oleh anggota setiap unit organisasi (Silalahi, 2014).

Analisis pembagian kerja harus dilakukan secara teliti dan hati-hati. Ini berarti bahwa dalam proses pembagian kerja, perlu ada keseimbangan antara kemampuan individu dengan jenis pekerjaan yang diamanahkan, disertai dengan prosedur dan disiplin kerja yang dapat dipahami dengan mudah oleh setiap individu. Hal ini bertujuan agar tugas, kewajiban, dan tanggung jawab mereka dilaksanakan secara efektif dan efisien menuju profesionalisme (Silalahi, 2018). Dalam konteks pembagian kerja, hal yang perlu dihindari adalah pembagian tugas yang berlebihan yang dapat mengarah pada fragmentasi tugas.



Untuk mengatasi hal ini, pembagian kerja harus dikoordinasikan dengan baik karena pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan tidak dapat dilakukan secara individu, melainkan memerlukan kerja sama yang baik (Sudriyaningsih, 2006).

Pembagian kerja yang matang diperlukan dalam sebuah organisasi karena tanpanya, anggota cenderung kehilangan fokus pada tujuan bersama. Dengan pembagian kerja yang efektif, setiap anggota diberi tanggung jawab yang jelas dan pengetahuan untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Hal ini juga meningkatkan efisiensi karena setiap individu dapat menggunakan keahlian mereka secara optimal dalam pelaksanaan tugas-tugas yang spesifik. Oleh karena itu, pembagian kerja menjadi penting karena tidak ada satu individu pun yang mampu melaksanakan semua tugas dalam organisasi, mengingat adanya keterbatasan dan kelebihan masing-masing anggota di bidangnya. Dengan terciptanya pembagian kerja yang efektif, diharapkan dapat merangsang kerjasama di antara anggota organisasi. Kerjasama ini akan terwujud ketika setiap individu memahami tujuan bersama, mampu mengenali kepentingan bersama, dan memiliki kemandirian yang cukup untuk mencapai tujuan organisasi (Sunandar dkk, 2019).

Menurut Firdaus (2015), variabel utama yang menjadi fokus dalam penelitiannya adalah pembagian tugas dan tanggung jawab antara suami dan istri sesuai dengan peran masing-masing. Banyak peneliti dalam studi tentang pembagian kerja menggunakan metode etnografi karena metode ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan informasi yang akurat dari berbagai sumber. Etnografi juga digunakan untuk memahami dan menggambarkan budaya dalam masyarakat dengan tujuan untuk memahami cara hidup dan pandangan hidup dari perspektif penduduk asli (Dewi, 2018).

2.3 Budaya Patriarki

Sejak zaman kuno, budaya di berbagai masyarakat dunia sering kali menempatkan laki-laki dalam posisi hierarki tertinggi, sementara perempuan dianggap memiliki status lebih rendah. Sebagai contoh, dalam masyarakat pada masa Vedic sekitar tahun 1500 SM, perempuan tidak diwarisi oleh suka keluarganya yang telah meninggal. Dalam tradisi Buddha pada periode



yang sama, perempuan sering kali dinikahkan sebelum mencapai usia pubertas dan sering kali tidak diberikan pendidikan, menyebabkan banyak dari mereka tidak bisa membaca dan menulis. Dalam tradisi hukum agama Yahudi, perempuan dianggap memiliki kedudukan yang rendah, dianggap najis, dan dianggap sebagai sumber polusi. Karena pandangan ini, mereka tidak diperbolehkan menghadiri upacara keagamaan dan hanya diizinkan berada di bagian belakang rumah peribadatan. Di Indonesia, selama masa penjajahan oleh Belanda dan Jepang, perempuan sering dieksploitasi sebagai budak seks oleh tentara asing yang bertugas di Indonesia. Selain itu, terdapat aturan yang menghalangi perempuan dari luar kalangan priyayi atau bangsawan untuk mendapatkan pendidikan (Sakina & Siti, 2017).

Menurut Gheaus (2012), baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk perlakuan yang adil. Ketidakadilan gender terjadi ketika perempuan diperlakukan secara tidak adil hanya karena jenis kelamin mereka, sering kali karena adanya kebencian atau prasangka terhadap perempuan. Dominasi patriarki yang tidak seimbang atau melampaui fungsi hierarki sosial utama dapat mengakibatkan ketidakadilan gender, yang sering kali terwujud dalam bentuk kekerasan gender. Kekerasan gender sering kali berasal dari konstruksi maskulinitas yang dominan, terutama dalam budaya tradisional yang sulit berubah, di mana laki-laki sering kali dipengaruhi oleh emosi seperti kemarahan dan kecemburuan (Chowdhury, 2015).

Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, sistem patriarki yang masih kuat belum menghasilkan banyak pemimpin perempuan di tingkat nasional. Situasi serupa terjadi di negara-negara seperti Indonesia, Filipina, Pakistan, dan India, di mana keberadaan pemimpin perempuan tidak mengindikasikan penurunan dominasi budaya patriarki dibandingkan dengan Amerika. Kehadiran pemimpin perempuan dalam konteks ini sering kali terkait dengan faktor kedekatan atau hubungan keluarga dengan figur pemimpin negara sebelumnya.

Contoh, Megawati adalah putri dari Presiden pertama Republik Indonesia, Aquino adalah istri dari Presiden Aquino di Filipina, dan Benazir Bhutto putri dari mantan Perdana Menteri Pakistan, Ali Bhutto. Selain faktor-faktor tersebut, perempuan masih sering dianggap kurang cocok untuk memimpin



laki-laki di berbagai bidang, termasuk kepemimpinan negara, lembaga pendidikan, perusahaan, dan dalam konteks keagamaan seperti menjadi imam dalam shalat yang melibatkan jamaah laki-laki. Pandangan ini masih berlaku meskipun banyak perempuan memiliki kualifikasi dan kemampuan yang sebanding (Nurmila, 2015).

Patriarki adalah perspektif yang menempatkan laki-laki di posisi yang lebih tinggi daripada perempuan dalam struktur hierarki sosial. Dalam konteks antropologi, konsep ini digunakan untuk menjelaskan kondisi sosial di mana laki-laki cenderung memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam masyarakat. Semakin tinggi posisi sosial seorang laki-laki, semakin kuat dorongan untuk mempertahankan dominasi ini, termasuk dalam konteks hubungan dalam rumah tangga. Dalam banyak kasus, istri dianggap sebagai objek, sementara laki-laki melihat diri mereka sebagai subjek yang memiliki kontrol dan kekuasaan. Akibatnya, istri sering diharapkan untuk tunduk pada dominasi dan kekuasaan suami (Nasrulloh dan Hidayat, 2022).

Perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk diperlakukan secara adil. Prinsip kesetaraan gender ini telah ditegaskan dalam berbagai peraturan, yang bukan sekadar pernyataan tetapi juga landasan hukum yang kuat. Baik pria maupun wanita memiliki hak-hak yang sama, dan tugas negara, pemerintah, serta hukum adalah untuk melindungi warganya agar hak-hak ini terlindungi. Perlindungan hukum ini memberikan jaminan bahwa perempuan tidak hanya bebas untuk menggunakan hak-haknya, tetapi juga dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan. Ini termasuk perlindungan dari tindakan sewenang-wenang terhadap perempuan serta menegaskan bahwa perlakuan kasar atau tidak pantas terhadap perempuan tidak dapat diterima. Dalam interaksi sosial, sangat penting untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain tanpa memandang perbedaan apa pun (Ismail, 2020).

Dalam banyak program pembangunan, partisipasi perempuan sering kali diperhatikan. Walaupun ada usaha pembangunan yang dilakukan, ini belum sepenuhnya terlibat secara menyeluruh. Mereka masih api ketertinggalan dalam bidang pendidikan dan kesempatan untuk



berpartisipasi dalam pengambilan keputusan (Sayogyo dalam Rahmawati dan Sunito, 2013). Menurut Mugniesyah (1995), program-program pemerintah belum efektif dalam menjangkau rumah tangga yang dikepalai perempuan. Studi gender di sektor pertanian menunjukkan bahwa meskipun kontribusi perempuan dalam usaha pertanian sangat signifikan, bahkan lebih besar daripada laki-laki, mereka masih menghadapi tantangan dalam mengakses dan mengendalikan informasi serta teknologi setara dengan laki-laki.

Keterbatasan partisipasi perempuan dalam program pembangunan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Salah satunya adalah kurangnya perhatian terhadap perempuan dalam kegiatan penyuluhan, serta ketidakmampuan anggota kelompok tani laki-laki untuk membagikan pengetahuan dan keterampilan mereka kepada pasangan perempuan. Selain itu, intervensi dari berbagai lembaga sering kali tidak mencukupi, ditambah dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan yang rendah serta pengaruh adat budaya yang menghambat partisipasi perempuan. Menurut Tamyis (2006), faktor tambahan yang mempengaruhi adalah peraturan mengenai pelaksanaan program dan pengetahuan lokal yang dimiliki masyarakat setempat.

Studi yang dilakukan oleh Kartasubrata et al. (1995) menunjukkan bahwa dalam program perhutanan sosial dari tahun 1984 hingga 1992, partisipasi perempuan tidak diatur secara resmi. Mereka tidak terlibat dalam pertemuan Kelompok Tani Hutan (KTH), yang merupakan tempat untuk merencanakan, melatih, dan mengambil keputusan terkait program tersebut. Namun, perempuan ikut serta dalam kegiatan seperti penanaman hutan dan pertanian di lahan yang merupakan bagian dari program perhutanan sosial.

Penelitian oleh Suharjito dan Sarwititi (1997) mengenai peran perempuan dalam rumah tangga penyadap getah pinus dalam pengelolaan hutan rakyat menunjukkan bahwa peran perempuan sering kali kurang terlihat dalam kegiatan produksi dan pasca produksi, karena dominasi kegiatan tersebut biasanya dilakukan oleh laki-laki. Namun, Mitchell et al. (2007) menekankan pentingnya peran perempuan dalam pengelolaan hutan, terutama karena peran



tradisional mereka sebagai penyedia bahan makanan bagi keluarga yang sangat bergantung pada hasil hutan.

Di Sulawesi Selatan, budaya patriarki masih kuat dipegang oleh sebagian besar masyarakatnya. Penelitian Mustari (2016) mengungkapkan bahwa perempuan suku Bugis sering disebut sebagai "*awiseng*" atau "*makkunrai*" dalam bahasa sehari-hari mereka. Mereka juga dianggap sebagai "*belojajareng*" (hiasan rumah) atau "*ati goari*" (isi dinding/bilik). Meskipun menikah atau menjadi istri, perempuan tetap mengikuti konsep-konsep seperti "*mulu jajareng*" (mengurus masalah rumah tangga) dan "*tanrere alebireнна aroane pawakkeengngi*" (memelihara martabat suami yang agung). Konsep-konsep ini membatasi peran perempuan dalam tugas domestik seperti mengurus sumur, dapur, dan kasur. Sebagai hasilnya, perempuan sering kali menduduki posisi yang lebih rendah dalam struktur sosial (Karim dan Hartati, 2022).

2.4 Etnografi

Etnografi merupakan metode penelitian yang erat hubungannya dengan bidang antropologi, fokus utamanya adalah mempelajari peristiwa budaya yang mencerminkan pandangan suatu masyarakat. Secara harfiah, etnografi merujuk pada laporan yang disusun oleh seorang antropolog mengenai suku bangsa atau budaya, berdasarkan penelitian lapangan yang dapat berlangsung beberapa bulan hingga beberapa tahun (Manan, 2021). Metode ini dianggap sebagai dasar dan asal usul ilmu antropologi. Secara sederhana, etnografi bisa dipahami sebagai gambaran mendalam tentang kehidupan suatu masyarakat, yang dibuat oleh peneliti berdasarkan informasi langsung dari lapangan. Fokusnya adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah budaya yang spesifik bagi masyarakat yang diteliti (Salim, 2001).

Penelitian etnografi melibatkan proses mendalam untuk memahami kehidupan masyarakat, yang melibatkan tidak hanya pemahaman terhadap kehidupan mereka tetapi juga pembelajaran dari interaksi langsung dengan masyarakat itu sendiri. Fokus utama dari penelitian etnografi adalah untuk memahami dan memahami struktur sosial serta budaya masyarakat. Budaya dalam konteks ini bukanlah sesuatu yang berbentuk materi, melainkan



representasi dari ide, gagasan, pikiran, emosi, perilaku, dan aktivitas kehidupan manusia. Etnografi, baik dalam bentuk laporan penelitian maupun sebagai metode penelitian, dianggap sebagai fondasi dan titik awal dalam pengembangan ilmu antropologi. Ilmu antropologi secara keseluruhan sangat bergantung pada laporan-laporan lapangan yang dibuat oleh peneliti yang berinteraksi langsung dengan masyarakat yang mereka amati. Dalam antropologi, terutama dalam antropologi sosial, praktik etnografi menjadi inti dari kegiatan penelitian. Semua karya perbandingan dan teoritis dalam antropologi budaya bergantung pada deskripsi etnografi yang teliti dan mendalam. Secara sederhana, mempelajari etnografi berarti memahami esensi dari ilmu antropologi, khususnya dalam konteks antropologi sosial, di mana peneliti tidak hanya berperan sebagai pengamat tetapi juga terlibat sebagai bagian dari masyarakat yang mereka teliti (Manan, 2021).

Secara umum, etnografi sering dimanfaatkan oleh para peneliti untuk memahami berbagai kebudayaan. Namun, pendekatan antropologi atau etnografi telah berkembang dari fokusnya pada masyarakat kecil yang terisolasi dan menggunakan teknologi sederhana. Saat ini, etnografi dianggap sebagai alat penting untuk memahami masyarakat kita sendiri serta masyarakat multikultural di seluruh dunia. Tujuan utama etnografi adalah untuk menggambarkan kebudayaan tertentu dengan memahami pandangan hidup dari perspektif orang-orang yang mempraktikkannya, serta cara mereka menghadapi dunia dan menjalani kehidupan.

Oleh karena itu, etnografi tidak hanya tentang mengamati masyarakat, tetapi juga tentang belajar dari masyarakat itu sendiri. Dalam upaya untuk mengungkap prinsip-prinsip kehidupan yang tersirat dalam kebudayaan, peneliti harus mengambil peran sebagai pelajar, sementara pemilik toko, cerita rakyat, dan petani lokal menjadi sumber pengetahuan yang berharga (Siddiq dan Salama, 2019).

Sebagai metode penelitian, etnografi memiliki kelebihan yang
nya diminati di kalangan peneliti. Salah satu keunggulan utama etnografi
emampuannya untuk mengamati individu dalam konteks sehari-hari
yang memungkinkan pemahaman yang lebih dalam dan otentik tentang



perilaku dan budaya yang sedang diamati. Dengan menggabungkan teknik observasi partisipatif dan wawancara mendalam, penelitian etnografi dapat memberikan pemahaman yang lebih kompleks tentang subjek yang diteliti. Selain itu, etnografi juga dapat mengungkapkan pola dan praktik budaya yang tidak selalu terlihat atau mudah diidentifikasi oleh orang luar. Namun, terdapat juga kelemahan dalam pendekatan etnografi ini. Sebagai contoh, etnografi memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup intensif, serta menimbulkan pertanyaan terkait objektivitas penelitian karena adanya subjektivitas peneliti dan tantangan dalam menggeneralisasi temuan dari satu budaya atau komunitas ke yang lainnya (Manan, 2021).

Angrosino (2007) memberikan pedoman tentang teknik observasi dalam etnografi. Menurutnya, terdapat beberapa teknik efektif untuk pengumpulan data dalam penelitian etnografi, yang dapat dicapai melalui tiga teknik utama yang harus dikuasai oleh setiap etnografer: observasi, wawancara, dan studi arsip/dokumen.

